



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DANIEL DEWANTORO RUMANI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 484656

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 7.660.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/200 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 67 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 34 m2/34 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 9 m2/9 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
8. Tanah Seluas 690 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 433.000.000**

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOBIL, JEEP CJ-7 Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.



3.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.742.214.475
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.835.214.475
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.835.214.475

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.